Anggota Berkasus, Dipondokpesantrenkan

KR-Dok Humas Polda DIY.

Penandatanganan kesepakatan bersama antara Bidang Propam Polda DIY dengan Ponpes Nurul Quran.

SLEMAN (KR) - Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda DIY menandatangani kesepakatan bersama dengan Pondok Pesantren Nurul Quran Kokap, Kulonprogo, Selasa (22/2). Kesepakatan yang berlangsung di ruang Sanika Satyawada Mapolda DIY ini terkait pembinaan mental keagamaan dan rohani bagi personel yang mempunyai catatan kasus.

"Pembinaan mental dan rohani nantinya akan dipusatkan di Pondok Pesantren Nurul Quran. Personel yang dibina, adalah mereka yang mempunyai catatan kasus setelah melalui proses sidang disiplin dan kode etik Polri," ujar Kabid Propam Polda DIY Kombes Pol Syaiful Anwar SIK.

Dijelaskan, kesepakatan bersama ini diharapkan dapat membina dan memberikan penguatan mental dan rohani agar menjadi anggota yang lebih baik. Selama ini, anggota yang mempunyai catatan kasus, diberikan sanksi disiplin atau penempatan di ruang khusus. "Harapan kami, selama di pesantren bisa membuat personel yang mempunyai catatan pelanggaran tersentuh, sehingga menjadi lebih baik," ujarnya. **(Ayu)-f**

BULAN ZAKAT PANUTAN TAHUN 2022

Baznas Harus Transparan dan Akuntabel

SLEMAN (KR) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sleman kembali mengadakan Bulan Zakat Panutan. Kegiatan rutin setiap tahunnya ini untuk membangun kesadaran bersama sekaligus memperbaharui kesanggupan para pejabat dan ASN di lingkungan Pemkab Sleman agar menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui Baznas Kabupaten Sleman.

"Pada tahun 2021, Baznas Kabupaten Sleman telah menghimpun zakat, infak dan sedekah sebesar 6.9 miliar dan menyalurkan sebesar 6.1 miliar. Nominal tersebut belum ideal dari perkiraan potensi zakat, infak dan sedekah ASN Sleman," ungkap Ketua Baznas Kabupaten Sleman Kriswanto di Pendapa Parasamya Kantor Setda Sleman, Selasa (22/2).

Pada kesempatan itu, Banzas Kabupaten Sleman juga memberikan penghargaan kepada 6 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada di lingkungan OPD Sleman dan Instansi lain atas partisipasi dan dukungannya terhadap Baznas Sleman. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Bupati Kustini.

Sementara Bupati menyebut kegiatan ini menjadi upaya motivasi dan juga wahana edukasi bagi para ASN di Sleman untuk berpartisipasi dalam pembayaran zakat melalui Baznas Kabupaten Sleman.

"Upaya Baznas Sleman dalam memfasilitasi ASN Pemkab Sleman yang beragama Islam dalam menunaikan zakat merupakan kemudahan tersendiri. Untuk itu saya berharap seluruh ASN Sleman dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan ini," jelasnya.

Bupati mendorong jajaran Baznas Sleman untuk secara terus menurus menginformasikan kepada muzzaki terkait penyaluran zakat, infak dan sedekah yang terkumpul. "Para pengurus Baznas juga harus transparan dan akuntabel dalam melaporkan dan mengelola zakat, infak dan sedekah yang masuk. Hal ini sebagai upaya dalam menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan para muzzaki," pesannya. **(Has)-f**

KR-Istimewa

Bupati menyerahkan penghargaan kepada unit pengumpul zakat.

STIKES Guna Bangsa Atasi Kasus Stunting

SLEMAN (KR) - Guna mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, penyelesaian masalah dan kolaborasi mahasiswa sejalan dengan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), STIKES Guna Bangsa Yogya yang berada di Condongcatur Depok Sleman menggandeng Puskesmas Karangmojo II untuk menyelesaikan kasus stunting di wilayah Kalurahan Bejiharjo Karangmojo Gunungkidul.

Kegiatan berlangsung mulai tanggal 7 Februari 2022 hingga Mei 2022, melalui mata kuliah Keperawatan Komunitas III, Manajemen Keperawatan, dan Keperawatan Bencana. Agenda yang dilakukan dengan menerapkan metode Riset Desa oleh mahasiswa program studi keperawatan dan tim peneliti yang beranggotakan Dr Dian Wuri Astuti SSi MSc, Siti Fadhilah SSi T MKes dan Eltanina Ulfameytalia Dewi S Kep Ns M Kep.

KR-Istimewa

Penyerahan mahasiswa keperawatan di wilayah kerja Puskesmas Karangmojo II.

"Secara global, percepatan penurunan stunting menjadi salah satu fokus dari Sustainable Development Goals (SDGs) dan Global Nutrition Target 2025. Hal ini sejalan dengan target penurunan stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu sebesar 19 persen pada tahun 2024," jelas Siti Fadhilah dalam keterangan tertulis, Senin (21/2) petang.

Diungkapkan, di DIY angka prevalensi stunting tertinggi berada di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 17,94 persen, dengan kasus balita stunting tertinggi terdapat di wilayah Kalurahan Bejiharjo. "Hal ini menjadi alasan dilakukannya Riset Desa oleh mahasiswa program studi keperawatan dan tim peneliti,"ungkap dia.

Siti Fadhilah berharap kegiatan riset desa didanai oleh Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) LPDP dapat memberikan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan kepada mahasiswa untuk mengungkap fenomena dan menyelesaikan permasalahan di wilayah kalurahan serta adanya interaksi mahasiswa dengan masyarakat akan membangun empati dan kepekaan mahasiswa terhadap persoalan sosial masyarakat. **(Zie)-f**

MELALUI 6 CABANG PEMINATAN

170 Siswa Lolos Program Merdeka Belajar

PAKEM (KR) - Pemkab Sleman melalui Dinas Pendidikan menggelar program Merdeka Belajar melalui Kegiatan Peminatan Khusus Siswa di SMPN 4 Pakem, Selasa (22/2). Kegiatan peminatan khusus siswa tersebut dilaksanakan melalui 6 cabang peminatan, yaitu seni tari, story telling, konten kreator, desain grafis, voli putra dan voli putri.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Sleman Ery Widaryana, jumlah siswa yang mengikuti program tersebut sebanyak 170 orang. Kegiatan ini telah mulai dilaksanakan di wilayah masing-masing pada tanggal 24 Januari sampai dengan 19 Februari 2022. Kemudian tanggal 22 Februari ini pelaksanaannya dipusatkan di SMPN 4 Pakem

"Ini merupakan hasil seleksi dari berbagai satuan pendidikan di Kabupaten Sleman yang dibagi di dalam empat wilayah, yakni wilayah utara, timur, barat dan tengah. Kemudian pelatihan ini menghadirkan para pelatih yang kompeten di setiap wilayah," ujarnya.

Ditambahkan Ery, tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia berwawasan global, kemandirian, gotong royong dan kreatif. Selain itu, kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk mengembangkan serta menumbuhkan rasa percaya diri bahwa setiap individu mempunyai kemampuan yang berbeda dengan orang lain.

Sementara Bupati Sleman Kustini mengatakan, Pemkab Sleman akan terus mendukung kegiatan tersebut demi mencetak generasi muda yang cerdas dan kreatif.

"Pada prinsipnya setiap anak memiliki minat masing-masing. Hal ini perlu didukung dan difasilitasi, sehingga kemampuan anak bisa berkembang dengan optimal. Mencetak generasi muda yang cerdas dapat tercipta dengan adanya dukungan dari semua elemen," tandasnya. **(Has)-f**

KR-Istimewa

Penampilan kesenian menandai peluncuran kegiatan Merdeka Belajar.

DPRD KABUPATEN SLEMAN
SUARA WAKIL RAKYAT
Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp.(0274)868413, Fax (0274)868413

KINERJA KOMISI A DPRD KABUPATEN SLEMAN

Responsif Terhadap Tumbuh Kembang Anak

SLEMAN (KR) - Komisi A DPRD Kabupaten Sleman sangat prihatin terhadap peristiwa kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak atau yang kerap disebut klithih. Dalam penanganan dan pencegahan klithih bukan hanya menjadi tanggungjawab dari aparat kepolisian saja, namun juga pemerintah daerah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sleman perlu lebih responsif terhadap tumbuh kembang anak.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sleman Ani Martanti ST mengatakan, dalam mensikapi permasalahan kejahatan jalanan yang dilakukan anak-anak, Komisi A telah monitoring ke beberapa kapanewon di Kabupaten Sleman. Hal itu untuk mengetahui secara pasti apa yang terjadi di lapangan.

"Kami ingin mengetahui motif dari aksi klithih yang dilakukan oleh anak-anak remaja ini. Setelah kami mendengar langsung dari lapangan, ternyata karakter dan model aksi klithih di wilayah barat, tengah dan timur itu berbeda," kata Ani Martanti, Selasa (22/2).

Pada prinsipnya, lanjut Ani, anak-anak muda yang akan melakukan kejahatan jalanan ini biasanya mengonsumsi minuman keras. Setelah itu berkeliling secara gerombolan untuk mencari sasaran di jalanan. "Mereka itu memang mencari musuh. Bahkan mereka itu tidak saling kenal antara pelaku dengan korban. Begitu ketemu di jalanan, mereka langsung beraksi," ucapnya.

Jika ini terus dibiarkan, tentu nantinya generasi muda akan menjadi rusak. Pemerintah daerah tidak boleh diam, namun harus lebih responsif terhadap perkembangan anak untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan jalanan.

"Kalau dibiarkan dan tidak ada penanganan yang baik, satu generasi kita akan hilang karena telah dirusak mentalnya. Makanya kami minta pemerintah daerah lebih responsif terhadap tumbuh kembang anak," ujar politisi dari PKB ini.

Menurutnya, Bupati Sleman telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang jam rumah atau jam istirahat anak. Dimana Perbup itu untuk membatasi kegiatan anak di luar rumah pada malam hari dan mengoptimalkan jam belajar di rumah pada malam hari.

KR-Istimewa

Ani Martanti ST

"Kami mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga (P3AP2KB) lebih masif mensosialisasikan perbup tersebut sampai ke pedukuhan dan kalurahan. Supaya orang tua bisa tegas melarang anaknya keluar rumah pada malam hari jika tidak ada kepentingan," tegasnya.

Sosialisasi tak hanya dilakukan di kalurahan dan padukuhan saja, namun juga perlu dilakukan di sekolah-sekolah. Kemudian juga perlu ada razia sepeda motor karena selama ini sepeda motor menjadi sarana untuk melakukan kajahatan jalanan oleh anak-anak.

"Orang tua tidak boleh memberikan motor untuk sekolah dengan alasan tidak bisa mengantar. Kalau kayak gitu apa gunanya zonasi, karena kebijakan itu sebenarnya untuk mendekatkan anak-anak supaya sekolah di lingkungan terdekat. Tapi ternyata masih banyak orang tua memberikan fasilitas motor untuk sekolah," kata anggota dewan dari Dapil 2 Sleman ini.

Di samping itu, dalam penanganan kejahatan jalanan ini sangat diperlukan sinergi mulai dari tingkat padukuhan, kalurahan, kapanewon hingga kabupaten. Apalagi sekarang ini Jaga Warga yang mulai digalakkan, sehingga dapat dioptimalkan untuk mencegah anak keluar rumah. Kemudian kalurahan mengaktifkan linmas dan kabupaten melalui Satpol PP gencar melakukan patroli untuk membubarkan anak-anak nongkrong atau berkeliaran pada malam hari.

"Ketika ada anak-anak yang keluar rumah pada malam hari, warga boleh melarang dan menangkap dengan dasar Perbup tadi. Kalau dari bawah sampai kabupaten sudah aktif dalam pencegahan, kami optimis klithih dapat diberantas," tuturnya.

Pemerintah daerah juga perlu memetakan wilayah yang merupakan zona merah klithih. Kemudian nanti ada sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya aksi klithih seperti pemasangan lampu di jalan dan pemasangan CCTV yang dianggap rawan kejahatan.

"Terkadang klithih ini terjadi di tempat sepi dan gelap. Makanya kami telah meminta kepada OPD terkait untuk memasang lampu penerangan jalan. Termasuk juga memperbanyak pemasangan CCTV di daerah rawan. Semua ini dilakukan untuk mencegah kejahatan jalanan dan menyelematkan generasi muda," pungkasnya. **(Sni) -f**

KR-Istimewa

Komisi A saat berkunjung ke Kapanewon Ngaglik.

KR-Istimewa

Komisi A mendengarkan aspirasi dan masukan dari tingkat kapanewon.